



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
SUKADANA
TAHUN 2025**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NOMOR : 900/986/23-SK/2025
NOMOR : 903/07/DPRD/VII/2025
TANGGAL : 07 Juli 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ELA SITI NURYAMAH**
Jabatan : Bupati Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **RIDA ROTUL ALIYAH**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur
- b. Nama : **ARIYAN PUTRA MARGA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur
- c. Nama : **WAYAN SURYA UTAMA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur
- d. Nama : **HANIF FAUZI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan APBD TA. 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Sukadana, 07 Juli 2025

Bupati Lampung Timur

Selaku,
PIHAK PERTAMA



ELA SITI NURYAMAH

Pimpinan DPRD
Kabupaten Lampung Timur
Selaku,
PIHAK KEDUA



RIDA ROTUL ALIYAH
KETUA

ARIYAN PUTRA MARGA
WAKIL KETUA

WAYAN SURYA UTAMA
WAKIL KETUA

HANIF FAUZI
WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan APBD TA. 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Sukadana, Juli 2025

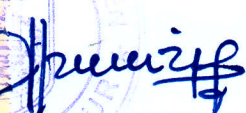
Bupati Lampung Timur

Selaku,
PIHAK PERTAMA



ELA SITI NURYAMAH

Pimpinan DPRD
Kabupaten Lampung Timur
Selaku,
PIHAK KEDUA


RIDA ROTUL ALIYAH
KETUA

ARIYAN PUTRA MARGA
WAKIL KETUA

WAYAN SURYA UTAMA
WAKIL KETUA



HANIF FAUZI
WAKIL KETUA



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
SUKADANA
TAHUN 2025**



DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) .	1
1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA	4
1.3. Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA	5
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	16
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	19
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN.....	19
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Lampung.....	21
3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Lampung Timur	22
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	26
4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	26
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah	28
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	32
5.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	32
5.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah	33
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	114
VII. STRATEGI PENCAPAIAN	116
VIII. PENUTUP.....	119



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun dan diterbitkan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah berjalan, diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang dikarenakan oleh adanya perubahan-perubahan, baik dari sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah maupun Pembiayaan Daerah.

Peraturan Daerah tentang APBD ini sebelumnya didahului adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor. 900/1895/23-SK/2024 dan Nomor. 903/17/DPRD/XI/2024 tanggal 6 November 2024 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 900/1896/23-SK/2024 dan Nomor. 903/18/DPRD/XI/2024 tanggal 6 November 2024 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025, dengan merujuk pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa;

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Guna konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman atau landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025, dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi- asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025, antara lain :

1. Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang tidak sesuai target penganggaran.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;
5. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer ;
6. Penyesuaian nomenkelatur program kegiatan Dana Alokasi Khusus
7. Pergeseran mendahului perubahan sebagai amanat peraturan perundang-undangan;
8. Penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program;
9. Penyesuaian program dan kegiatan untuk merespon permasalahan aktual yang terjadi dan membutuhkan penanganan segera/prioritas.

Dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun 2025 disusun sebagai bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2025. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan meliputi :

- I. Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD, tujuan penyusunan Perubahan KUA dan dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.
- II. Kerangka Ekonomi Makro Daerah, meliputi perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan arah kebijakan keuangan daerah.
- III. Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, berisi tentang asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN, asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung, dan asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.

- IV. Kebijakan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan perubahan target pendapatan daerah.
- V. Kebijakan Belanja Daerah, meliputi kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.
- VI. Kebijakan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.
- VII. Strategi Pencapaian, yaitu langkah konkret dalam mencapai target.
- VIII. Penutup

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, bahwa Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan. adapun tujuan dilakukannya penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025;
- 2. Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
- 3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- 4. Menyesuaikan postur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagaimana telah tertuang dalam Perubahan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025;
- 5. Menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran belanja prioritas terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
7. Melakukan penajaman program dan kegiatan prioritas daerah melalui pergeseran anggaran, pengurangan/penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Adapun dasar hukum penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tandar Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 9);
32. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
33. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
34. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
35. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
36. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
37. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan kerangka ekonomi makro daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka memberikan gambaran berkaitan dengan perkembangan ekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto (PDRB), dan inflasi yang sedang terjadi pada tahun berjalan. Perubahan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 tidak terlepas dari pengaruh ekonomi makro Provinsi Lampung dan nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global.

Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi April 2025, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,8 persen pada 2025 dan 3,0 persen pada 2026. Angka ini masing-masing turun sebesar 0,5 dan 0,3 persen poin dibandingkan proyeksi pada Januari 2025. Penurunan ini dipicu oleh dampak langsung dari eskalasi perang tarif, serta dampak tidak langsung melalui disrupsi rantai pasok, meningkatnya ketidakpastian global, dan memburuknya sentimen pelaku usaha. Dampak dari kondisi global ini dirasakan oleh banyak negara. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 juga direvisi turun menjadi 4,7 persen (turun 0,4 persen poin), meskipun penurunan ini tergolong moderat dibandingkan negara lain seperti Thailand (-1,1 pp), Vietnam (-0,9 pp), Filipina (-0,6 pp), dan Meksiko (-1,7 pp).

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp 5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.264,5 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen. Konsumsi rumah tangga menjadi

pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi sebesar 54,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meskipun demikian, ada potensi perlambatan ekonomi global yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa faktor yang memicu ketidakpastian global antara lain perlambatan ekonomi negara maju dan meningkatnya tensi perdagangan dunia. Bank Indon Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 masih relatif stabil, namun perlu terus diawasi dampak dari perlambatan ekonomi global. Pemerintah dan BI terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi domestik dan memperkuat ketahanan ekonomi menghadapi tantangan global. esia (BI) telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi 4,6% - 5,4%.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatatkan Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I tahun 2025 tercatat sebesar 5,47% (year-on-year). Angka ini menunjukkan kinerja positif dan menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, didorong oleh konsumsi dan ekspor. Angka ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan ekspor barang dan jasa. Tiga sektor mendominasi perekonomian daerah yaitu pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, yang berkontribusi sebesar 58,83 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor pertanian mencatat distribusi sebesar 24,37 persen, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 21,92 persen. sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 19,52 persen terhadap PDRB, dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi sebesar 29,36 persen. Sektor perdagangan berkontribusi signifikan, dengan distribusi sebesar 14,95 persen terhadap PDRB dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 17,95 persen.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 berpedoman pada laporan perkembangan ekonomi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Lampung Timur yang merupakan laporan terakhir yang tersedia.

Perkembangan ekonomi pada tahun 2025 ditinjau dari PDRB dasar harga berlaku Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai Rp 56,85 triliun. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar Rp 3,98 triliun dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 52,87 triliun rupiah. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari Rp 30,63 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp 32,04 triliun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan sepanjang tahun 2024 ekonomi Kabupaten Lampung Timur tumbuh sebesar 4,62 persen, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,51 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi seluruh sektor ekonomi dan sudah terbebas dari pengaruh inflasi.

Ditinjau menurut kontribusi setiap lapangan usaha terhadap PDRB Lampung Timur, perekonomian Kabupaten Lampung Timur masih sangat bergantung pada sektor primer. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menyumbang lebih dari 50 persen penciptaan nilai tambah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024). Dalam periode tersebut, ekonomi Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh tiga kategori utama, yaitu: Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), Kategori B (Pertambangan dan Penggalian), Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Hal ini terlihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB.

Perkembangan ekonomi daerah tahun 2024, selain ditunjang oleh perkembangan nilai tambah PDRB juga dipengaruhi oleh perkembangan laju inflasi daerah. Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 merupakan salah satu dari 60 kabupaten tambahan yang menjadi lokus penilaian inflasi di Indonesia. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Timur pada bulan Maret 2025 inflasi year on year sebesar 1,71 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,98 pada Maret 2024 menjadi 111,86 pada Maret 2025. Mencermati perkembangan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 dan

kondisi inflasi yang diperkirakan tetap terkendali namun berpotensi meningkat akibat tekanan harga pangan dan energi, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu mengambil berbagai langkah guna meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian dan mengendalikan inflasi daerah.

Pembangunan ekonomi pada Perubahan APBD tahun 2025 akan difokuskan pada pengembangan UMKM dan industri pengolahan berbasis potensi lokal. Kebijakan anggaran difokuskan pada pemberdayaan UMKM melalui peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pembiayaan, serta dukungan terhadap pemasaran produk, termasuk melalui platform digital. Langkah ini menjadi penting sebagai strategi penguatan struktur ekonomi lokal dalam merespons menurunnya kontribusi ekspor akibat perlambatan ekonomi global.

Sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah, kebijakan anggaran diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan harga dengan melaksanakan Operasi Pasar Murah Berkala guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan pokok. Selain itu, dilakukan pengembangan komoditas pemicu inflasi seperti cabai, bawang merah, dan beras, dengan dukungan pada sisi hulu maupun hilir produksinya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga akan memperkuat kebijakan stabilisasi harga makanan dan minuman melalui pemantauan harga bahan pokok secara berkala, serta pengawasan distribusi dan stok distributor guna mencegah kelangkaan maupun penimbunan barang.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga akan mendorong penguatan ketahanan pangan. Kebijakan anggaran diarahkan untuk meningkatkan produktivitas subsektor pertanian, peternakan, dan perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, penguatan penyuluhan, serta perluasan akses terhadap teknologi pertanian modern. Dengan penguatan ketahanan pangan, diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas pasokan bahan pangan pokok, tetapi juga

mendorong pendapatan petani dan nelayan sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap tekanan ekonomi.

Kebijakan anggaran daerah juga difokuskan untuk peningkatan infrastruktur pendukung sektor ekonomi prioritas, seperti pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani, jaringan irigasi, pasar rakyat, serta fasilitas logistik dan distribusi. Hal ini bertujuan untuk menurunkan biaya produksi dan distribusi, memperluas akses pasar, serta mempercepat arus barang dan jasa antar wilayah. Pembangunan infrastruktur juga akan difokuskan pada pembangunan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten guna mewujudkan target kemandapan jalan kabupaten. Berdasarkan data Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, tingkat kemandapan jalan kewenangan Kabupaten pada tahun 2024 sebesar 49,17 persen, dibawah target Ranwal RPJMD yang sebesar 54 persen.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga akan memperkuat pengembangan sektor pariwisata lokal sebagai alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kebijakan anggaran akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur destinasi wisata, desain destinasi wisata prioritas dan wajah perkotaan Sukadana. Dengan langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong tumbuhnya sektor-sektor pendukung seperti akomodasi dan makan/minum.

Selain itu, untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, kebijakan anggaran juga akan difokuskan pada penciptaan lapangan pekerjaan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan mengarahkan program pembinaan kewirausahaan bagi pencari kerja, pengembangan UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi lokal yang berperan dalam menciptakan nilai tambah di desa. Langkah ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah



Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029.

Tema dan prioritas pada Tahun Anggaran 2025 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 adalah “Melanjutkan Pembangunan SDM, Ekonomi, Infrastruktur, dan Pelayanan Publik untuk Penguatan Fondasi Transformasi Daerah Berkelanjutan”.

Guna kesinambungan pembangunan di tahun 2025, Pembangunan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 tetap fokus pada pembangunan sumber daya manusia, pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah yang ditunjang oleh kemantapan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan hasil efisiensi belanja pada APBD Murni dialihkan untuk digunakan pada:

- a. Bidang pendidikan
- b. Bidang kesehatan
- c. Infrastruktur dan sanitasi
- d. Optimalisasi pengendalian inflasi
- e. Stabilitas harga makanan dan minuman
- f. Penyediaan cadangan pangan
- g. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Definisi ini mencakup penerimaan daerah dari berbagai sumber seperti pajak, retribusi, dana perimbangan, dan kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain.

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Sebagai contoh Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terkait dengan jalan untuk Pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional maka menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Penyelenggaraan jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan Jalan kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Kab./Kota.

Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau



6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan khususnya berkaitan dengan kapasitas fiskal, diarahkan bagaimana memaksimalkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja wajib dan mengikat, Mandatory Spending, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan pemenuhan kegiatan yang mendukung pada pencapaian target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan.

Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta tetap mempedomani kebijakan pembangunan yang tertuang didalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Lampung Timur. Adapun kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diarahkan antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan pendapatan daerah;

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer baik dari pemerintah provinsi maupun pendapatan transfer pemerintah pusat. Disamping itu, juga dilakukan penyesuaian pendapatan meindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi



Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Kebijakan belanja daerah;

Kebijakan belanja daerah diarahkan antara lain untuk memenuhi kekurangan belanja wajib dan mengikat, penyesuaian belanja akibat dari penyesuaian pendapatan. Kemudian penyesuaian komposisi belanja dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu dilakukan penyesuaian belanja penggunaan Silpa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.

3. Kebijakan pembiayaan daerah.

Berkaitan dengan pembiayaan daerah, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk pembiayaan defisit belanja daerah dan penyertaan modal daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2025, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun KUA PPAS Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025.

Lebih lanjut, Pemerintah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Dalam pelaksanaan tema pembangunan tersebut, untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Merujuk penjelasan BAPPENAS, pembangunan tahun 2025 akan menjadi tahapan pembangunan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya. Dalam pelaksanaan hal tersebut, pembangunan nasional di tahun 2025 memiliki sasaran pokok sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2025

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TARGET 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0
Rasio Gini	0,379 - 0,382
Indeks Modal Manusia (IPM)	0,56
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Lampung

Merujuk musrenbang RKPD Provinsi Lampung tahun 2024, Lampung sebagai bagian dari NKRI memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa: “perencanaan pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”.

Memperhatikan faktor internal : Lampung memiliki modal dasar pada aspek geografis dan demografi; daya dukung dan daya tampung lingkungan, capaian pembangunan sebelumnya, yang dikombinasikan dengan perhatian terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan lingkup daerah memperhatikan faktor eksternal, tantangan dan isu strategis pembangunan pada lingkup global, arah kebijakan pembangunan nasional, dan lingkup kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pencapaian pembangunan daerah di tahun 2025, prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2025 meliputi :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
2. Peningkatan kualitas hidup SDM
3. Penanggulangan kemiskinan
4. Pembangunan infrastruktur
5. Reformasi birokrasi
6. Pemantapan kehidupan masyarakat aman, berbudaya, dan demokratis
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Melalui prioritas pembangunan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan beberapa sasaran makro pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Indikator Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TARGET 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,9-5,3
Inflasi (%)	1,5 – 3,5
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	52,6 – 54,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,8 – 3,5
Tingkat Kemiskinan (%)	9,5 – 10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,97
Indeks Gini	0,282 – 0,293
Nilai Tukar Petani (NTP)	109 – 110
Pertumbuhan PAD	2,0
Kemantapan Jalan Provinsi (%)	78
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	13

Sumber : Ranwal RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025

3.3 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur

Tema dan prioritas pada Tahun Anggaran 2025 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 adalah “Melanjutkan Pembangunan SDM, Ekonomi, Infrastruktur, dan Pelayanan Publik untuk Penguatan Fondasi Transformasi Daerah Berkelanjutan”.

Guna kesinambungan pembangunan di tahun 2025, tema Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur sama dengan tema tersebut. Pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap fokus pada pembangunan

sumber daya manusia, pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah yang ditunjang oleh kemantapan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan hasil efisiensi belanja pada APBD Murni dialihkan untuk digunakan pada:

- a. Bidang pendidikan
- b. Bidang kesehatan
- c. Infrastruktur dan sanitasi
- d. Optimalisasi pengendalian inflasi
- e. Stabilitas harga makanan dan minuman
- f. Penyediaan cadangan pangan
- g. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur dalam P-RKPD Tahun 2025 akan tetap mengacu pada prioritas pembangunan tahun 2025 dengan mengakomodir prioritas nasional berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang meliputi:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi;
- 2) Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan;
- 3) Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 4) Meningkatkan layanan SPM, penanggulangan kemiskinan, prevalensi stunting dan perlindungan sosial masyarakat;
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik berkualitas dan merata;

- 6) Membangun keluarga berkualitas, perlindungan anak dan perempuan, serta pemuda dan olahraga;
- 7) Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat;
- 8) Melestarikan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Melalui prioritas pembangunan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan beberapa sasaran makro pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Tahun 2025

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TAHUN 2024	RKPD 2025	P-RKPD 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%) (tanpa migas)	4,96	4,35	4,9 – 5,0
2	Pertumbuhan Ekonomi (%) (dengan migas)	4,62	3,8	4,6 – 4,8
3	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	49,27	49,5	50 – 51,5
4	Inflasi (%)	1,71	3,28	2,5 (+/-1)
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,05	73,6	73 – 73,38
6	Kemiskinan (%)	13,19	12,97	12,97 – 12,90
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,02	2,49	3,02 – 2,49
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	49,17	57	54 - 57
9	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	N/A	10	10 - 9

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

Memperhatikan arah kebijakan dan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan April 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi, maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2025, baik berupa pergeseran pagu program/kegiatan/sub kegiatan, pagu program/kegiatan/sub kegiatan antar OPD, penghapusan program/kegiatan/sub



kegiatan, penambahan program baru/kegiatan baru/sub kegiatan baru maupun sub kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu program/kegiatan/sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa;

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Beberapa hal terjadi juga pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sehingga diperlukan adanya perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (pajak daerah, hasil retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Bagi hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Khusus) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya). Setiap kelompok pendapatan tersebut, kemudian dirinci kembali dalam jenis pendapatan.



Sampai dengan akhir Mei Tahun 2025, tercatat pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp. 758.323.835.309,- atau sebesar 32,28 % (persen) dari target pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp. 2.348.546.673.405,-. Dari realisasi pendapatan daerah tersebut, terdiri dari :

1. Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 50.667.424.004,- atau sebesar 18,09 % (persen) dari target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 280.046.453.121,-.
2. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 707.656.411.305,- atau sebesar 34,21 & (persen) dari target pendapatan transfer sebesar Rp. 2.068.500.220.284,-.

Melihat kondisi aktual kinerja ekonomi dan fiskal nasional sekaligus daerah serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan April 2025, terutama dari sisi pendapatan, maka penyesuaian pendapatan perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur diarahkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025, mempertimbangkan:
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan asli daerah, berpedoman pada kepastian dan dasar hukum penerimaannya.
 - b. Realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan bulan April tahun 2025.
 - c. Penyesuaian proyeksi PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Parkir.
2. Pendapatan Transfer yang dianggarkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, mempertimbangkan:
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan transfer, berpedoman pada kepastian dan dasar hukum penerimaannya.
 - b. Realisasi pendapatan transfer sampai dengan bulan April tahun 2025.

- c. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH)
- d. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)
- e. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Desa
- f. Penyesuaian Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.413.455.608.342,00. sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Pendapatan Daerah diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 2.343.215.215.639,00. Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di atas diproyeksikan berasal dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 277.980.466.486,00
- 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.065.234.749.153,00

Uraian dari masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 280.046.453.121,00. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.065.986.635,00 atau sebesar 0,74 persen menjadi sebesar Rp 277.980.466.486,00.

Adapun uraian dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar tersebut diatas adalah sebagai berikut :



4.2.1.1 Pajak daerah

Pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak daerah pada Perubahan APBD TA 2025 direncanakan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. Rp. 152.870.000.000,00.

4.2.1.2 Retribusi daerah

Retribusi daerah pada Perubahan APBD 2025 direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp. 315.900.000,00 dari target sebesar Rp. 110.201.453.121,00 menjadi sebesar Rp. 109.885.553.121,00.

4.2.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Komponen selanjutnya dari pendapatan asli daerah yaitu Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Perubahan APBD TA 2025 diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp. 3.295.086.635,00 dari target awal sebesar Rp. 6.500.000.000,- menjadi sebesar Rp. 3.204.913.365,00

4.2.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sumber pendapatan asli daerah berikutnya adalah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada Perubahan APBD TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.545.000.000,00 dari target semula sebesar Rp. 10.475.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 12.020.000.000,00.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Adapun Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dari Propinsi).

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 2.133.409.155.221,00. Pada Perubahan APBD TA 2025

pendapatan transfer diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. 68.174.406.068,00 menjadi sebesar Rp. 2.065.234.749.153,00. Apabila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025, pendapatan transfer pada Perubahan APBD mengalami penurunan sebesar 3,20 persen.

Adapun uraian dari jenis pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

4.2.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2.013.269.889.000,00. Selanjutnya pada Perubahan APBD TA 2025 direncanakan menjadi sebesar Rp. 1.948.073.008.000,00. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp. 65.196.881.000,00 atau sebesar 3,24 persen.

4.2.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Lampung yang pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 120.139.266.221,00 pada Perubahan APBD TA 2025 di rencanakan mengalami perubahan menjadi Rp. 117.161.741.153,00 naik sebesar Rp. 2.977.525.068,00 atau 2,48 %.

Rincian target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA 2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Perubahan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Pagu Murni TA 2025	Proyeksi Perubahan TA 2025	Penurunan/ Penambahan	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.413.455.608.342,00	2.343.215.215.639,00	(70.240.392.703,00)	-2,91%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.046.453.121,00	277.980.466.486,00	(2.065.986.635,00)	-0,74%
4.1.01	Pajak Daerah	152.870.000.000,00	152.870.000.000,00	-	0,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	110.201.453.121,00	109.885.553.121,00	(315.900.000,00)	-0,29%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000,00	3.204.913.365,00	(3.295.086.635,00)	-50,69%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.475.000.000,00	12.020.000.000,00	1.545.000.000,00	14,75%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.133.409.155.221,00	2.065.234.749.153,00	(68.174.406.068,00)	-3,20%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.013.269.889.000,00	1.948.073.008.000,00	(65.196.881.000,00)	-3,24%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.139.266.221,00	117.161.741.153,00	(2.977.525.068,00)	-2,48%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di Tahun 2025 diarahkan antara lain untuk :

1. Pemenuhan alokasi belanja wajib dan mengikat;
2. Peningkatan alokasi belanja infrastruktur konektivitas, sosial dan ekonomi;
3. Peningkatan alokasi belanja dalam rangka pemenuhan SPM dan pengendalian inflasi;
4. Peningkatan alokasi belanja dalam rangka pengembangan sektor unggulan dan strategis, khususnya sektor basis ekonomi daerah;
5. Peningkatan alokasi belanja dalam rangka peningkatan kualitas SDM masyarakat;
6. Peningkatan alokasi belanja layanan publik, publikasi dan informasi publik;
7. Peningkatan alokasi belanja dalam rangka penanggulangan kemiskinan;



8. Peningkatan alokasi belanja pemberdayaan masyarakat dan sektor sosial;
9. Peningkatan alokasi belanja pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan perencanaan daerah;
10. Perubahan kebijakan penganggaran belanja prioritas terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
11. Perubahan kegiatan yang disebabkan adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, serta antar rincian obyek belanja;
12. Penyesuaian terhadap Perubahan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Timur T.A. 2025;
13. Kegiatan yang benar-benar penting dan mendesak dengan mempertimbangkan sumber daya dan sisa waktu pelaksanaan.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Belanja Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2.430.455.608.342,00. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur direncanakan menjadi sebesar

Rp. 2.452.178.542.542,00 atau meningkat sebesar 0,89 persen dari APBD Murni 2025.

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 di atas dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 1.680.468.488.276,60
2. Belanja Modal sebesar Rp. 289.798.522.221,40
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 7.857.117.405,00
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 474.054.414.639,00

Uraian dari masing-masing kelompok belanja daerah adalah sebagai berikut :

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp 1.711.473.041.675,70 sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 1.680.468.488.276,60. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp. 31.004.553.399,10 atau sebesar 1,81 persen.

Adapun uraian dari kelompok belanja operasi adalah sebagai berikut :

5.2.1.1 Belanja Pegawai

Pada APBD TA 2025 belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 1.022.456.922.613,00 sedangkan pada Perubahan APBD direncanakan sebesar Rp. 944.435.361.275,93. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp. 78.021.561.337,07 atau sebesar 7,63 %.

5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 534.009.010.184,02, kemudian pada Perubahan APBD diproyeksikan sebesar Rp. 513.118.546.352,51. Hal ini

mengalami pengurangan sebesar Rp. 20.890.463.831,51 atau 3,91 persen.

5.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah pada APBD Murni TA 2025 dialokasikan sebesar Rp. 153.755.487.878,68 Sedangkan pada Perubahan APBD direncanakan sebesar Rp. 218.358.284.648,16 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 64.602.796.769,48 atau sebesar 42,02 persen .

5.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.251.621.000,00, sedangkan pada Perubahan APBD TA 2025 mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 4.556.296.000,00.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah Tahun 2025.

Belanja modal pada Perubahan APBD Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 22,81 persen yaitu sebesar Rp. 53.817.716.861,10. Pada APBD TA 2025 sebesar Rp 235.980.805.360,30 menjadi sebesar Rp. 289.798.522.221,40 pada Perubahan APBD TA 2025.

Adapun uraian dari jenis belanja modal adalah sebagai berikut :

5.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2.199.400.000,00 sedangkan pada Perubahan APBD tidak mengalami perubahan.

5.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 44.455.760.463,86 sedangkan pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 50.667.875.400,67 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.212.114.936,81 atau sebesar 13,97 persen.

5.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran pada APBD TA 2025 untuk belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. 59.841.655.328,70 menjadi sebesar Rp. 87.087.733.060,94 pada Perubahan APBD TA 2025. Hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 27.246.077.732,24 atau 45,53 persen.

5.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 114.051.908.207,74 sedangkan pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 134.428.943.759,79 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 20.377.035.552,05 atau 17,87 persen.

5.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp 15.432.081.360,00 sedangkan pada Perubahan APBD tidak mengalami pengurangan menjadi sebesar Rp. 15.414.570.000,00.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pada Tahun Anggaran 2025 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar sebesar Rp. 34.463.881.406,00. Pada perubahan APBD TA 2025 menjadi sebesar Rp. 7.857.117.405,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 26.606.764.001,00 atau sebesar 77,20 persen.

5.2.4. Belanja Transfer

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 448.537.879.900,00 kemudian menjadi sebesar Rp.



474.054.414.639,00. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.516.534.739,00 atau 5,69 persen.

Adapun uraian dari kelompok belanja transfer adalah sebagai berikut :

5.2.4.1 Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 28.148.978.639,00

5.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 445.905.436.000,00.

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel 5.1
Belanja Daerah APBD TA 2025 dan Proyeksi Perubahan APBD TA 2025

Kode	Uraian	Pagu Murni TA 2025	Proyeksi Perubahan TA 2025	Penurunan/ Penambahan	%
5	BELANJA DAERAH	2.430.455.608.342,00	2.452.178.542.542,00	21.722.934.200,00	0,89%
5.1	BELANJA OPERASI	1.711.473.041.675,70	1.680.468.488.276,60	(31.004.553.399,10)	-1,81%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.022.456.922.613,00	944.435.361.275,93	(78.021.561.337,07)	-7,63%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.009.010.184,02	513.118.546.352,51	(20.890.463.831,51)	-3,91%
5.1.05	Belanja Hibah	153.755.487.878,68	218.358.284.648,16	64.602.796.769,48	42,02%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.251.621.000,00	4.556.296.000,00	3.304.675.000,00	264,03%
5.2	BELANJA MODAL	235.980.805.360,30	289.798.522.221,40	53.817.716.861,10	22,81%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.199.400.000,00	2.199.400.000,00	0,00	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.455.760.463,86	50.667.875.400,67	6.212.114.936,81	13,97%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.841.655.328,70	87.087.733.060,94	27.246.077.732,24	45,53%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.051.908.207,74	134.428.943.759,79	20.377.035.552,05	17,87%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.432.081.360,00	15.414.570.000,00	(17.511.360,00)	-0,11%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	34.463.881.406,00	7.857.117.405,00	(26.606.764.001,00)	-77,20%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	34.463.881.406,00	7.857.117.405,00	(26.606.764.001,00)	-77,20%
5.4	BELANJA TRANSFER	448.537.879.900,00	474.054.414.639,00	25.516.534.739,00	5,69%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.849.630.000,00	28.148.978.639,00	12.299.348.639,00	77,60%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	432.688.249.900,00	445.905.436.000,00	13.217.186.100,00	3,05%

TABEL 5.2
DAFTAR KESELARASAN
TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN KABUPATEN

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO	TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN SESUAI RKPD TAHUN 2025	TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN SESUAI KEM-PPKF TAHUN 2025	TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN PADA PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2025	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,74	5,3 - 5,6	4,9 - 5,0	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,09	4,5 - 5,0	3,02 - 2,49	
3	Rasio Gini	0,315	0,379 - 0,382	0,315	
4	Indeks Modal Manusia (IMM)	0	0	0	
5	Tingkat Kemiskinan (%)	13,8	7,0 - 8,0	12,97 - 12,90	
6	Penurunan Emisi GRK (%)	10	38,6	10	

TABEL 5.3
ALOKASI BELANJA PEGWAI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	% TERHADAP BELANJA DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
a	Total Belanja Daerah	2.452.178.542.542,00	
b	Belanja Pegawai	944.435.361.275,93	
c	Belanja Tambahan Profesi Guru (TPG)	179.394.529.830,00	
d	Belanja Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil)	3.114.000.371,00	
e	Belanja Tambahan Kesejahteraan Guru (TKG)	-	
f	Tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya	-	
g	Belanja pegawai diluar belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya $g=(b-(c+d+e+f))$	761.926.831.074,93	31,07%

TABEL 5.4
PENANDAAN RINCIAN FUNGSI PENDIDIKAN
UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM APBD

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	839.908.337.036,00
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	560.796.388.028,58
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.583.953.384,00
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	853.205.406,00
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	2.383.954.190,00
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	697.383.453,00
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	435.607.000,00
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	117.782.500,00
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	188.447.500,00
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	95.940.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	77.542.600.000,00
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	154.207.000,00
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	171.997.000,00
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	139.055.000,00
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	172.307.500,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	186.000.000,00
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	173.740.000,00
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.653.606.451,00
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	270.580.500,00
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	232.650.000,00
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	34.366.411.415,00
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	339.330.000,00
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4.037.279.390,00
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.786.076.568,42
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.659.063.407,00
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.097.831.578,00
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	1.271.928.900,00
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	814.623.490,00
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	341.054.988,00
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	363.330.000,00
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	126.300.000,00
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	276.428.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	153.200.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	45.828.300.000,00
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	128.900.000,00
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	175.397.000,00
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	142.055.000,00
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	173.158.808,00
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	210.030.000,00
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	408.300.000,00
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.358.480.404,00
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	270.015.000,00
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.149.319.790,00
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	9.196.973.643,00
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	685.219.000,00
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	281.269.163,00
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	110.000.000,00
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	129.410.775,00
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	400.000.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	16.837.200.000,00
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	415.000.000,00
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	200.800.100,00
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	300.000.000,00
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	136.893.500,00
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.086.386.400,00
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	132.814.310,00
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	731.564.400,00
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	123.502.880,00
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.621.342.618,00
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	226.000.000,00
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	111.030.400,00
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	329.577.995,00
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.904.300.000,00
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	93.138.360,00
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28.679.472.215,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000,00
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	137.011.750,00
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.688.301.364,00
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	340.155.000,00
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	286.301.232,00
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	72.226.000,00
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	226.227.280,00
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.027.901.080,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	83.475.000,00
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	125.175.200,00
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	151.259.680,00
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	26.611.400,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	641.379.800,00
3	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Sekampung	10.910.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.525.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.385.000,00
4	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Tanjung Harapan	10.989.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.450.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.539.000,00
5	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Karya Tani	11.292.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.800.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.492.000,00
6	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Margototo	6.973.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.973.000,00
7	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Adirejo	19.527.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.200.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.327.000,00
8	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Wana	14.550.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.400.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.150.000,00
9	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Labuhan Maringgai	3.750.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.750.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-
10	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Trimulyo	3.570.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.570.000,00
11	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Pakuan Aji	6.912.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.000.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.912.000,00
12	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Sukaraja Tiga	4.662.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.500.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.162.000,00
13	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Pasir Sakti	14.956.800,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.300.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.656.800,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
14	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Donomulyo	18.042.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.250.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.792.000,00
15	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Sidorejo	13.275.600,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.200.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.075.600,00
16	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Braja Harjosari	17.655.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.500.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.155.000,00
17	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Sumber Rejo	13.277.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.900.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.377.000,00
18	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mataram Baru	8.037.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.625.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.412.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
19	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Raman Utara	12.717.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.525.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.192.000,00
20	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Pugung Raharjo	13.035.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.400.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.635.000,00
21	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Way Jepara	41.268.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	33.750.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.518.000,00
22	1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Sribhawono	25.815.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14.625.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.190.000,00
23	1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Batanghari	16.575.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.000.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.575.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
24	1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Sukaraja Nuban	24.005.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.850.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.155.000,00
25	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Pekalongan	18.810.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.875.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.935.000,00
26	1.02.0.00.0.00.01.0025	Puskesmas Peniangan	17.922.900,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.250.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.672.900,00
27	1.02.0.00.0.00.01.0026	Puskesmas Raja Basa Lama	24.498.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.500.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.998.000,00
28	1.02.0.00.0.00.01.0027	Puskesmas Tambah Subur	27.924.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21.750.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.174.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
29	1.02.0.00.0.00.01.0028	Puskesmas Rejo Katon	12.975.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.575.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.400.000,00
30	1.02.0.00.0.00.01.0029	Puskesmas Gantiwarno	17.893.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.800.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.093.000,00
31	1.02.0.00.0.00.01.0030	Puskesmas Braja Caka	4.575.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.575.000,00
32	1.02.0.00.0.00.01.0031	Puskesmas Sukadana	39.227.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.750.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	26.477.000,00
33	1.02.0.00.0.00.01.0032	Puskesmas Bumi Emas	10.573.000,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.200.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.373.000,00
34	1.02.0.00.0.00.01.0033	Puskesmas Purbolinggo	20.156.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.250.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.906.000,00
35	1.02.0.00.0.00.01.0034	Puskesmas Jabung	6.960.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.960.000,00
36	1.02.0.00.0.00.01.0035	Puskesmas Way Mili	31.273.800,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	23.400.000,00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.873.800,00
37	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	600.000,00
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600.000,00
38	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	263.685.533,00
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	80.000.000,00
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	48.198.617,00
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	135.486.916,00
39	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	702.146.760,00
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	116.429.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150.561.000,00
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000,00
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	29.700.000,00
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	30.000.000,00
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	101.116.760,00
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	49.340.000,00
40	2.11.1.04.2.10.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	82.231.613,00
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	25.000.000,00
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	10.705.612,00
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	17.062.331,00
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	29.463.670,00
41	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	490.120.900,00
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	45.120.900,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	445.000.000,00
42	2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	41.143.915,00
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	31.255.915,00
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	9.888.000,00
43	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	-
44	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	184.794.248,00
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	11.202.792,00
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000,00
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	567.710,00
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.516.406,00
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	41.849.459,00
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	50.000.000,00
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	13.657.881,00
45	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	71.335.600,00
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	44.194.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	27.141.600,00
46	3.26.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3.294.958.920,00
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	-
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	81.750.000,00
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1.212.250.000,00
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	742.834.000,00
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	583.693.316,00
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	81.462.380,00
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	93.143.000,00
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	20.745.000,00
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	320.841.894,00
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	158.239.330,00
47	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	73.744.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	73.744.000,00
48	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	243.000.419,00
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	35.420.727,00
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	19.547.773,00
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	19.105.271,00
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	68.926.648,00
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100.000.000,00
49	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	548.276.807,00
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	548.276.807,00
50	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	7.600.000,00
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.600.000,00
51	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	630.000.000,00
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	600.000.000,00
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	30.000.000,00
Y SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN (Rp.)			848.114.457.931,00
LANJA DAERAH (Rp.)			2.452.178.542.542,00
SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN (MINIMAL 20%)			34,59

TABEL 5.5
PENANDAAN RINCIAN BELANJA INFRASTRUKTUR
UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM APBD

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	102.579.160.150,42
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.500,00
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.000,00
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.106.800,00
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.975.300,00
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.034.000,00
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.187.479,00
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.353.600,00
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.388.100,00
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.500.000,00
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.420.000,00
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.321.600,00
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48.519.700,00
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.766.000,00
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.536.780,00
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.500.000,00
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.200.300,00
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.188.800,00
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131.000.000,00
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.721.652,00
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.249.283.500,00
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	262.843.000,00
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.118.000,00
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.583.953.384,00
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	853.205.406,00
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	2.383.954.190,00
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	697.383.453,00
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	95.940.000,00
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	171.997.000,00
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	139.055.000,00
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	172.307.500,00
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.653.606.451,00
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	34.366.411.415,00
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4.037.279.390,00
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.786.076.568,42
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.659.063.407,00
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.097.831.578,00
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	1.271.928.900,00
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	814.623.490,00
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	153.200.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	175.397.000,00
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	142.055.000,00
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.358.480.404,00
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.149.319.790,00
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	9.196.973.643,00
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	685.219.000,00
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	281.269.163,00
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	400.000.000,00
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	200.800.100,00
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.086.386.400,00
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	731.564.400,00
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.621.342.618,00
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	329.577.995,00
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	137.011.750,00
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.688.301.364,00
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	72.226.000,00
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	226.227.280,00
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	28.389.556.556,00
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.027,00
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.106.855,00
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.975.342,00
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	19.850.443,00
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.187.479,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.353.607,00
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	33.770.701,00
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.293.404,00
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.860.000,00
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.953.750,00
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	21.088.155,00
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	28.827.019,00
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.127.580,00
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.523.300,00
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.772.191,00
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.192.000,00
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.249.792,00
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.998.840,00
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	386.500.000,00
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.770.000,00
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.100.000,00
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	4.441.270.965,00
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	891.643.610,00
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	8.321.196.847,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	207.479.610,00
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	446.058.586,00
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.863.913.995,00
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.925.204.604,00
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	306.683.177,00
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	18.084.900,00
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	342.962.412,00
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.669.500.000,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.729.966.122,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	51.440.900,00
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	66.423.829,00
3	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana	48.748.815.551,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	48.748.815.551,00
4	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas	2.159.632.880,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.977.793.880,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	181.839.000,00
5	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Tanjung	1.277.541.224,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.130.513.224,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	147.028.000,00
6	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Karya Tani	1.209.750.245,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.069.746.245,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	139.404.000,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	600.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
7	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Margototo	1.554.761.814,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.400.785.814,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	153.976.000,00
8	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Adirejo	1.432.627.171,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.305.230.171,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	127.093.000,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	304.000,00
9	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Wana	1.671.494.462,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.523.133.587,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	147.368.000,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	992.875,00
10	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Labuhan	4.234.403.538,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.051.243.538,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	183.010.000,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00
11	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Trimulyo	1.303.827.538,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.154.398.538,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	149.429.000,00
12	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Pakuan Aji	899.970.071,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	757.545.071,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	142.425.000,00
13	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Sukaraja	1.170.020.047,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.019.663.047,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	150.282.000,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	75.000,00
14	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Pasir Sakti	2.612.488.774,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.423.864.574,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	188.549.200,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	75.000,00
15	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Donomulyo	1.179.030.622,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.041.777.622,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	137.253.000,00
16	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Sidorejo	1.595.461.992,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.449.677.592,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	145.642.400,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	142.000,00
17	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Braja	1.794.895.619,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.620.985.619,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	173.910.000,00
18	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Sumber	2.719.284.713,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.528.907.713,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	190.377.000,00
19	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Mataram	2.191.153.041,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.040.763.041,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	150.390.000,00
20	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Raman	1.489.339.910,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.344.763.910,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	144.576.000,00
21	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Pugung	2.174.472.899,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.978.189.899,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	196.245.000,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	38.000,00
22	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Way Jepara	3.044.676.465,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.850.827.465,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	193.849.000,00
23	1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas	2.645.201.904,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.453.822.904,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	191.278.000,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	101.000,00
24	1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Batanghari	1.863.401.461,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.673.570.461,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	189.831.000,00
25	1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Sukaraja	1.969.164.712,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.795.118.712,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	173.896.000,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00
26	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Pekalongan	1.985.941.650,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.806.008.650,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	179.933.000,00
27	1.02.0.00.0.00.01.0025	Puskesmas Peniangan	1.516.855.302,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.367.305.202,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	149.550.100,00
28	1.02.0.00.0.00.01.0026	Puskesmas Raja Basa Lama	1.676.477.470,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.450.670.470,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	225.807.000,00
29	1.02.0.00.0.00.01.0027	Puskesmas Tambah	1.739.239.076,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.587.547.076,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	151.542.000,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
30	1.02.0.00.0.00.01.0028	Puskesmas Rejo Katon	862.672.759,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	721.920.759,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	140.743.000,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	9.000,00
31	1.02.0.00.0.00.01.0029	Puskesmas Gantiwarno	1.027.157.533,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	904.946.533,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	121.461.000,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	750.000,00
32	1.02.0.00.0.00.01.0030	Puskesmas Braja Caka	781.851.481,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	650.121.481,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	131.730.000,00
33	1.02.0.00.0.00.01.0031	Puskesmas Sukadana	3.091.313.011,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.899.922.011,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	191.241.000,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00
34	1.02.0.00.0.00.01.0032	Puskesmas Bumi Emas	1.167.225.458,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.017.521.458,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	148.504.000,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.200.000,00
35	1.02.0.00.0.00.01.0033	Puskesmas	2.780.815.359,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.603.304.359,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	177.511.000,00
36	1.02.0.00.0.00.01.0034	Puskesmas Jabung	1.992.798.161,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.833.077.161,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	159.721.000,00
37	1.02.0.00.0.00.01.0035	Puskesmas Way Mili	2.725.505.027,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.553.080.827,00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	171.299.200,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.125.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
38	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.482.226.755,00
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.148.949.078,00
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.277.102,00
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.187.479,00
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.145.949,00
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.239.216,00
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.403.515,00
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.298.430,00
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.927.386,00
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.205.663,00
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.614.754,13
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.397.666,00
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.844.964,50
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	8.158.003.070,00
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.451.000,00
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.442.380,00
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.380.000,00
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.383.806.640,00
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	477.160.000,00
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	20.425.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.460.000,00
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	11.130.000,00
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	1.900.000.000,00
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.976.133.302,00
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.074.390.408,00
	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	10.249.000,00
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	10.000.000,00
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	446.885.962,00
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	3.422.423.396,00
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	522.116.570,00
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	103.162.209,00
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.389.494.636,00
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.778.333.173,00
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10.489.236,00
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	2.430.938.626,00
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9.028.680.323,00
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.233.355.932,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	112.398.036,00
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	21.223.900.740,00
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	110.911.009,00
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	153.136.949.392,61
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	16.688.008.133,80
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	2.942.584.310,60
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	4.969.506.876,00
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.461.541.158,00
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.134.889.899,36
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	224.823.897,00
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	208.057.837,00
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	977.253.400,00
39	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	905.977.695,00
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.865.422,00
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.683.076,00
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.387.131,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.137.500,00
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.623.248,00
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600.000,00
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.215.081,00
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.017.300,00
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.883.206,00
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	579.600,00
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	51.216.368,00
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.746.842,00
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.343.680,00
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	416.600,00
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.407.200,00
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.583.700,00
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.126.300,00
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.710.000,00
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	237.084.666,00
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450.000,00
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	900.775,00
40	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan	8.286.909.390,67
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.027,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.106.855,00
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.187.479,00
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194,00
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	913.300,00
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.160.000,00
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.834.241,00
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.193.780,17
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.388.368,00
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.999.080,00
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	553.554.960,00
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.676.180,00
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.602.500,00
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.836.880,00
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	330.103.895,00
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	192.767.882,00
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	48.198.617,00
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	540.753.031,00
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	88.310.560,00
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	165.701.105,00
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	91.483.000,00
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.528.854.667,00
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	345.408.283,00
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	251.724.461,00
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3.452.305.419,50
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	11.643.196,00
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	135.486.916,00
41	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.766.738.505,00
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.027,00
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.106.855,00
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.187.479,00
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194,00
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	426.289.500,00
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.220.000,00
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.421.436,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.407.500,00
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.140.000,00
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	659.500.000,00
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210.030.000,00
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.896.000,00
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	20.000.000,00
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	98.425.000,00
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	68.400.000,00
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	58.000.000,00
42	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan	3.452.750.855,00
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.687.514,00
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.187.479,00
	2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194,00
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.000.000,00
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.101.000,00
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.450.000,00
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.732.000,00
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.196.668,00
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.882.100,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.087.900,00
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150.561.000,00
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	92.377.000,00
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	30.000.000,00
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.236.400.000,00
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	528.000.000,00
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	75.600.000,00
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	650.000.000,00
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000,00
43	2.11.1.04.2.10.01.0000	Dinas Lingkungan	41.895.372.489,00
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	50.000.000,00
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	9.750.000,00
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	9.960.028,00
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	9.228.363,00
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	30.000.000,00
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	82.778.158,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8.000.000,00
	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	14.984.895,00
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	4.300.000,00
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.809.088.008,00
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	19.670.120,00
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.259.081.206,00
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	18.075.656,00
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	25.470.355.805,00
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	789.104.605,00
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.522.782,00
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	2.054.554.972,00
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	39.145.211,00
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.265.614,00
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.027,00
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.106.855,00
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.392.124,00
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.353.607,00
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194,00
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.651.806,00
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.510.047,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.490.500,00
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.000.000,00
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.000.000,00
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	945.410.404,00
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	308.250.839,00
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.509.500,00
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	15.490.440,00
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	20.000.000,00
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	20.000.000,00
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	60.000.000,00
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	915.726.012,00
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	35.000.000,00
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	30.000.000,00
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	17.062.331,00
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	675.199.214,00
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	1.757.486.166,00
44	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan	1.887.572.878,45
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.687.514,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.219.027,00
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.895.342,00
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.888.194,00
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.678,00
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.039.900,00
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	489.134.487,00
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.423.945,45
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.284.079,00
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.532.310,00
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.400.382,00
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	889.513.920,00
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259.191.000,00
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000,00
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.912.100,00
45	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.096.239.674,00
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.462.000,00
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000,00
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000,00
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.780.000,00
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.983.729,38

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.016.270,62
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.317.000,00
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.999.152,00
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	282.645.600,00
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195.948.000,00
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.436.900,00
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.912.000,00
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	325.000.000,00
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	125.239.022,00
46	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	19.591.299.870,00
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.194.530,00
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.983.940,00
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.999.840,00
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.988.140,00
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.999.945,00
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.998.535,00
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.999.800,00
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.160.000,00
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.137.825,00
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.002.647,00
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.707.100,00
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.194.000,00
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.620.763,00
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	483.912.000,00
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	327.760.005,00
	2.15.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	250.000.000,00
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.880.000,00
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	104.619.300,00
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	16.026.890.300,00
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	208.973.400,00
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000,00
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.240.358.600,00
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	30.000.000,00
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	209.919.400,00
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	214.999.800,00
47	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.067.716.875,00
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.299.027,00
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.098.783,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.435.342,00
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.688.978,00
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.952.047,00
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.953.607,00
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.045.972,00
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.643.714,00
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.813.870,00
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.889.800,00
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.009.544,00
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.197.358,00
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.000.000,00
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	272.700,00
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.530.600,00
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.991.520,00
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.028.000,00
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245.145.000,00
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.675.901,00
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	994.200,00
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	129.873.950,00
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	11.557.700,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	640.717.710,00
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	30.948.432,00
	2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	145.640.848,00
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	16.447.181,00
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	501.526.587,00
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.446.860.529,00
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	53.177.976,00
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	133.343.419,00
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47.976.229,00
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	91.132.837,00
48	2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	2.425.551.698,00
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	7.646.843,00
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	9.453.302,00
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.027,00
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.106.855,00
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.975.342,00
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.000.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.187.479,00
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.353.607,00
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194,00
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.189.968,00
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.011.283,00
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.311.795,00
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.204.900,00
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.905.242,00
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	218.820.100,00
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.293.440,00
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.683.180,00
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	254.701.000,00
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.398.400,00
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.251.594.227,00
49	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.206.596.854,91
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.593.881,00
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.027,00
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.106.855,00
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.187.479,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.377.125,00
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194,00
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.000.029,00
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.612.354,12
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.112.082,29
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.969.004,00
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.000.000,00
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	325.899.410,50
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.240.544,00
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.341.920,00
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.060.000,00
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.570.200,00
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	146.658.750,00
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	535.000.000,00
50	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	970.062.439,00
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.678.338,00
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.234.473,00
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.033.061,00
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.306.889,00
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.241.620,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.024.436,00
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	544.277.120,00
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.592.000,00
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.570.000,00
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.334.000,00
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	11.202.792,00
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	567.710,00
51	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.713.226.263,00
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.087.000,00
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.222.579,00
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.861.345,00
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.109.458,00
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.553.607,00
	3.25.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.235.001,00
	3.25.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000,00
	3.25.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.454.484,00
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.946.125,00
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.166.540,00
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	998.522.542,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	265.809.877,00
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.030.000,00
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	11.916.968,00
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	114.538.188,00
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	27.141.600,00
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	401.593.015,00
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	78.740.600,00
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.437.813.418,00
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	25.000.000,00
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	25.000.000,00
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	20.000.000,00
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	39.483.916,00
52	3.26.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata,	4.420.354.462,00
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1.212.250.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	742.834.000,00
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.555.466,00
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.012.988,00
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.373.265,00
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.233,00
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.556.505,00
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.746.391,00
	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.890.533,00
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.042.747,50
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.035.200,00
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.918.353,50
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.593.370,00
	3.26.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.860.000,00
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	295.050.000,00
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.712.000,00
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	889.190.760,00
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	364.143.900,00
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.220.000,00
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	501.369.750,00
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15.000.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
53	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan	13.938.428.670,84
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	20.509.542,00
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	1.030.560.000,00
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	40.419.733,00
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	239.416.422,34
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000,00
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.920.000,00
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.920.000,00
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.819.300,00
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.286.205,00
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.630.500.000,00
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	536.760.500,00
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.200.000,00
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	8.075.481.606,00
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	34.653.174,00
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	1.199.488.220,00
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	26.456.344,00
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	124.810.374,50
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	23.769.666,00
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	25.000.000,00
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	10.000.000,00
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	466.588.957,00
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	165.000.000,00
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7.368.627,00
54	3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.704.472.274,00
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.447.568,00
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.978.922,00
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.826.750,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.695.050,00
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.373.122,00
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.018.517,00
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.184.717,00
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.088.022,00
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.938.022,00
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.412.076,00
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.107.871,00
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.885.385,00
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.900.000,00
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.527.580,00
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.036.072,00
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	287.592.000,00
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.827.000,00
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.104.000,00
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.300.000,00
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.644.636,00
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	44.393.791,00
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	465.078.133,00
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	685.427.278,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	275.980.599,00
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	63.857.084,00
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	3.880.667,00
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal	634.893,00
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	117.160.211,00
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	281.798.253,00
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	24.374.055,00
55	4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN UMUM	15.788.805.468,00
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	168.082.800,00
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	786.276.500,00
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.016.130.896,00
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	719.777.687,00
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.422.404.620,00
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.045.339.000,00
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.896.220.400,00
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.525.637.345,00
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.845.400,00
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.140.090.820,00
56	4.01.0.00.0.00.01.0003	BAGIAN ORGANISASI	353.740.749,00
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	106.478.675,00
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	107.850.209,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	139.411.865,00
57	4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN	219.498.665,00
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	87.387.390,00
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	132.111.275,00
58	4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN	140.315.410,00
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	140.315.410,00
59	4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN	856.051.706,00
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.687.514,00
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.219.027,00
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.946.855,00
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.895.342,00
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	82.475.125,00
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.187.479,00
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.353.607,00
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	247.049.108,00
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194,00
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	265.047.809,00
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	213.701.646,00
60	4.01.0.00.0.00.01.0011	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	807.395.642,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	329.785.082,00
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	306.507.460,00
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	171.103.100,00
61	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	8.852.998.622,00
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.827.990,00
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.187.479,00
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.353.607,00
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.990.200,00
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.888.194,00
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21.957.500,00
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000,00
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.881.738,00
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	73.744.000,00
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	366.484.000,00
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	167.603.450,00
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000,00
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	488.600.000,00
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.000.000,00
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	441.981.600,00
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	635.869.850,00
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	376.098.778,00
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.164.800.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	735.770.000,00
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.576.401.236,00
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	243.950.000,00
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	983.609.000,00
62	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.857.314.593,00
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.687.514,00
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.353.607,00
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.988.194,00
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.700.000,00
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000,00
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.000.000,00
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.800.000,00
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	218.400.000,00
	5.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	30.219.750,00
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	313.000.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.652.600,00
	5.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	39.900.000,00
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.160.000,00
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	77.900.097,00
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	122.763.369,00
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	152.483.879,00
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	110.000.000,00
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	21.998.898,00
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	18.355.969,00
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	51.076.137,00
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	27.167.853,00
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	18.182.700,00
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	112.120.213,00
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60.323.036,00
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	23.353.767,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	137.218.749,00
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.260.591,00
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.921.928,00
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	51.413.574,00
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	119.382.078,00
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	346.959.563,00
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15.000.000,00
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	36.972.000,00
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	74.499.644,00
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.000.000,00
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15.000.000,00
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	37.052.000,00
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	71.680.793,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	140.120.000,00
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	32.000.000,00
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	65.610.036,00
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	50.007.000,00
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	183.009.000,00
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	46.040.000,00
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	22.955.100,00
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	27.220.000,00
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100.000.000,00
	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	91.632.662,00
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	162.772.292,00
63	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.681.636.782,00
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.047.514,00
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.591.627,00
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.706.855,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.547.479,00
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194,00
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.300.000,00
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	754.791,00
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.995.164,00
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.557.202,00
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.581.000,00
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.061.125,00
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	458.150.950,00
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	719.806.060,00
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	467.572.624,00
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.244.000,00
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.569.029,00
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.141.150,00
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	95.421.294,00
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	363.599.999,00
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	467.880.945,00
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	288.619.780,00
64	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	3.858.012.534,00
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.027,00
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.106.855,00
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.975.342,00
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.187.479,00
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.353.607,00
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.503.119,00
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194,00
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	26.919.070,00
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.790.055,00
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.500.000,00
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	15.407.368,00
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.906.802,00
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.954.835,00
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74.775.856,00
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.250.000,00
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.845.022,00
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.647.866,00
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.469.473,00
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	427.200,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.500.000,00
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	462.770.000,00
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	132.268.890,00
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.695.365,00
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.564.200,00
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.949.697,00
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.020.815.170,00
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.610.958,00
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.732.829,00
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.136.687,00
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.577.758,00
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.035.804,00
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	715.885.134,00
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	43.735.358,00
65	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian,	1.227.878.102,00
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.027,00
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.106.855,00
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.895.342,00
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.187.479,00
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.353.607,00
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.873.624,00
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.929.842,00
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.831.784,00
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.072.069,00
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.232.326,59
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.105.600,00
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.467.656,00
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.000.000,00
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.067.809,00
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	340.055.265,41
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	258.716.600,00
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.931.800,00
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.862.000,00
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	32.985.064,00
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	8.488.644,00
66	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	1.196.900.934,00
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.481.423,00
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.249.542,00
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.116.427,00
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.600.000,00
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.626.579,00
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.883.226,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.883.168,00
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	124.016.534,00
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.698.689,00
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.014.300,00
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.481.232,00
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319.522.800,00
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	287.699.500,00
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.780.000,00
67	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Metro Kibang	167.659.755,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	450.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.083.668,00
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.328.107,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.194.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.003.340,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.040.640,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.370.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000,00
68	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Batanghari	238.183.647,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	450.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.036.680,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.723.200,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.696.967,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.592.000,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.774.800,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.070.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000,00
69	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sekampung	231.690.436,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.042.130,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.800.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.999.108,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.732.617,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.758.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.551.200,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.227.381,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.130.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000,00
70	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Pekalongan	164.215.846,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.550.100,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.400,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.247.177,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.829.804,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.633.232,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.920.000,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.000.000,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.935.133,00
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.100.000,00
71	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Purbolinggo	177.578.251,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.852.979,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.932.167,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.054.459,11

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.662.900,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.024.231,89
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.154.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.050.000,00
72	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Raman Utara	213.688.420,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.917.470,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.959.622,17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.329.110,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.186.475,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.514.400,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.013.828,83
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.740.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.180.000,00
73	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Way Bungur	175.103.276,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.116.444,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.488.272,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.349.400,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.101.977,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.951.983,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.855.200,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.740.000,00
74	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bumi Agung	279.848.851,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.462.304,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.737.580,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.204.331,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.882.500,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.440.419,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.138.476,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.112.183,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.020.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.150.995,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.700.063,00
75	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Sukadana	261.538.871,00
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.500.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.966.601,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.418.150,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.192.000,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.262.120,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.670.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.530.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00
76	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Marga Tiga	221.048.146,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	575.391,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.651.727,44
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.370.080,00
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.289.706,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.943.925,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.434.800,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.467.602,56
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.041.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.696.400,00
77	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Sekampung Udik	235.693.051,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.829.500,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.532.178,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.948.437,00
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.101.335,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.296.646,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.318.555,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.212.000,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.919.280,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.535.120,00
78	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Labuhan Ratu	178.693.828,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.079.909,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.626.667,76
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.090.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.727.416,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.173.835,24
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.996.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
79	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Way Jepara	234.982.586,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.552.936,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.148.693,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.583.439,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.099.918,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.727.600,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.870.000,00
80	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Braja Selebah	217.036.281,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.522.491,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.742.650,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.090.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.446.850,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.549.290,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.735.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000,00
81	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Mataram Baru	218.101.556,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.036.835,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.736.400,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.967.900,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.108.000,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.457.421,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.455.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.140.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
82	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Jabung	229.116.985,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.300.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.946.940,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.641.150,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.636.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.118.800,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.718.095,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.916.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000,00
83	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Gunung Pelindung	231.566.101,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.434.554,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.047.305,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.834.742,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.328.500,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.979.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.664.000,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.680.400,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.835.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.762.600,00
84	7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Marga Sekampung	201.276.533,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.290.997,00
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.223.431,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.319.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.418.400,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.952.827,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.480.200,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.591.678,00
85	7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Melinting	178.723.246,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.539.044,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.900.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.967.121,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.273.765,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.385.188,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.878.128,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.420.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.760.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.600.000,00
86	7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Waway Karya	198.235.386,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.063.426,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.721.140,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.955.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.024.100,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.926.720,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.521.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.024.000,00
87	7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Bandar Sribhawono	201.867.737,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.869.137,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.624.213,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.388.000,00
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	34.380.696,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.049.500,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.808.268,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.308.923,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.729.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.510.000,00
88	7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Labuhan Maringgai	243.946.026,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.371.077,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.623.102,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.680.461,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.087.230,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.121.377,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.509.279,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.566.300,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.420.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.567.200,00
89	7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Batanghari Nuban	226.392.789,50
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.047.298,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.888.611,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.093.657,50
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.232.583,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.876.000,00

Nomor	Kode Program/Kegiatan	Uraian Program Kegiatan	Jumlah Anggaran
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.194.900,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.777.000,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.911.840,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.560.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.810.900,00
90	7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Pasir Sakti	254.992.968,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.665.705,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.319.125,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.220.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.232.800,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.627.824,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.130.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.950.000,00
91	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	942.426.103,00
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.903.961,00
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.647.634,00
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.267.000,00
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.082.808,00
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.000.000,00
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	241.364.700,00
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.160.000,00
BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (Rp.)			654.033.639.177,79
H DI LUAR BELANJA TRANSFER (Rp.)			1.978.124.127.903,00
BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (MINIMAL 40%)			33,06

TABEL 5.6
ALOKASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		%EARMARK PENGUNAAN	PAGU	JUMLAH	KET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
A	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR		10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi	3.902.402.372,20		
	1	Rekonstruksi Jalan			4.475.060.143,59	
		<i>Jumlah</i>			4.475.060.143,59	
		TOTAL ALOKASI PENGUNAAN HASIL PENERIMAAN OPSEN PKB (Rp.)			4.475.060.143,59	
		TOTAL PENDAPATAN OPSEN PKB (Rp.)			39.024.023.722,00	
		PERSentase ALOKASI OPSEN PKB MINIMAL 10%			11.47 %	

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		%EARMARK PENGUNAAN	PAGU	JUMLAH	KET
B	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU		10% untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan insfrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum	4.500.000.000,00		
	1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			4.259.081.206,00	
	2	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			25.470.355.805,00	
	3	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			789.104.605,00	
	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			1.063.800.000,00	
		<i>Jumlah</i>		-	31.582.341.616,00	

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		%EARMARK PENGUNAAN	PAGU	JUMLAH	KET
		TOTAL ALOKASI PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PBJT-TL (Rp.)			31.582.341.616,00	
		TOTAL PENDAPATAN PBJT-TL (Rp.)			45.000.000.000,00	
		PERSENTASE ALOKASI PBJT-TL MINIMAL 10%			70,18	
C	PAJAK AIR TANAH		10% untuk pencegahan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kab/kota yang berdampak terhadap kualitas air tanah meliputi penanaman pohon pembuatan lubang atau sumur resapan pelestarian hutan atau pepohonan dan pengelolaan limbah	80.000.000,00		
	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			169.784.706,63	
		<i>Jumlah</i>			169.784.706,63	

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		%EARMARK PENGUNAAN	PAGU	JUMLAH	KET
		TOTAL ALOKASI PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAT (Rp.)			169.784.706,63	
		TOTAL PENDAPATAN PAT (Rp.)			800.000.000,00	
		PERSENTASE ALOKASI PAT MINIMAL 10%			21.22 %	
D	PAJAK ROKOK		50% (75% untuk BPJS), Sisanya untuk penegakan hukum	24.549.533.835,50		
	1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			18.353.925.624,00	
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			75.000.000,00	
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			43.904.982,00	
	4	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			22.750.000,00	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			6.745.000,00	
		<i>Jumlah</i>		-	18.502.325.606,00	
		TOTAL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK (Rp.)			49.099.067.671,00	
		DASAR PERHITUNGAN ALOKASI MINIMAL 50% PAJAK ROKOK			24.549.533.835,50	
		ALOKASI PAJAK ROKOK MINIMAL 37,5% UNTUK PEMBAYARAN BPJS			18.353.899.200,00	

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		%EARMARK PENGUNAAN	PAGU	JUMLAH	KET
		ALOKASI PAJAK ROKOK 12,5% SELAIN UNTUK PEMBAYARAN BPJS			148.426.406,00	
		TOTAL ALOKASI PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK (Rp.)			18.502.325.606,00	
		TOTAL PERSENTASE ALOKASI PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK (%)			37.68 %	
E	JUMLAH TOTAL PROGRAM			33.031.936.207,70	54.729.512.072,22	
	SELISIH (LEBIH/(KURANG))				21.697.575.864,52	



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran Tahun 2025 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 113.463.326.903,00

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan daerah Kabupaten Lampung Timur pada APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.000.000.000,- sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 4.500.000.000,00.

Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah APBD TA 2025 dan Perubahan APBD TA 2025

Kode	Uraian	Pagu Murni TA 2025	Perubahan TA 2025	Penurunan/ Penambahan	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	113.463.326.903,00	93.463.326.903,00	467,32%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00	113.463.326.903,00	93.463.326.903,00	467,32%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000,00	113.463.326.903,00	93.463.326.903,00	467,32%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	4.500.000.000,00	1.500.000.000,00	50,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	4.500.000.000,00	1.500.000.000,00	50,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	4.500.000.000,00	1.500.000.000,00	50,00%
	Pembiayaan Netto	17.000.000.000,00	108.963.326.903,00	91.963.326.903,00	540,96%

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Berpedoman pada periodisasi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, Tahun 2025 adalah tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, dan menjadi tahapan penting untuk mempertahankan momentum kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025.

Selanjutnya, guna memastikan konsistensi dan sinergitas pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan daerah akan diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional serta program strategis pusat, dengan memperhatikan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Perpaduan berbagai tinjauan tersebut dituangkan menjadi prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target pendapatan asli daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD.
- 2) penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
- 3) Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah.
- 4) Memantapkan kelembagaan.
- 5) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- 7) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.

- 8) peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan
- 9) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait di tingkat daerah dan provinsi.

Sedangkan langkah-langkah dan strategi yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target pendapatan transfer sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan upaya instensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
- 3) Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dapat terserap sesuai dengan target penerimaan daerah.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil dari input program kegiatan yang rencanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Oleh karena itu, dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar terarah , efektif dan efisien, maka kebijakan belanja daerah Tahun 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Lampung Timur, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan pemrintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada Tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan Tahun 2025, yaitu: memacu Pemulihan Ekonomi, memacu Pembangunan Infrastruktur, peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter, peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.



BAB VIII PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 ini disepakati bersama antara Bupati Lampung Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur, sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025.